

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES**  
**FRAKSI**  
**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**



**Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah**

**Tanggal 24 November 2025**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES  
FRAKSI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN



Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dibacakan Oleh  
**MULYADI, SE, MM**

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

om Swastiastu,

Namo Budaya,

Rahayu,

dan Salam Kebajikan.

Merdeka !!!

- Saudara Ketua DPRD dan Pimpinan Rapat yang Kami Hormati,
- Saudara Gubernur Jawa Tengah yang Kami Hormati,
- Rekan-Rekan Anggota DPRD yang Kami Hormati,
- Seluruh Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah,
- Rekan-Rekan Wartawan, LSM,
- dan segenap Tamu Undangan yang Berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses dan Pembacaan Pandangan Umum Fraksi Masa Persidangan pertama tahun sidang 2025 / 2026.

Fraksi PDI Perjuangan hadir sebagai representasi politik yang memiliki tanggung jawab historis dan ideologis untuk berdiri tegak di sisi

Wong Cilik. Pandangan Umum ini merupakan instrumen resmi untuk menjalankan fungsi checks and balances terhadap kebijakan eksekutif. Sesuai dengan semangat Banteng Moncong Putih, kami dengan tegas menuntut agar setiap alokasi APBD merefleksikan prinsip Trisakti, yakni Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Kami menolak kebijakan yang tidak berbasis data kerakyatan dan berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural.

Pimpinan Sidang yang kami hormati,

Reses menjadi validasi empiris atas kinerja pembangunan dengan metode menghidupkan ruang dialektika antara anggota Dewan dengan konstituennya. Temuan langsung di lapangan bukan sekadar daftar usulan belaka, melainkan bukti konkret adanya indikasi kegagalan sistemik yang menghambat peningkatan Indeks Kesejahteraan Rakyat. Urusan kedaulatan pangan yang merupakan dimensi fundamental dari Berdikari Ekonomi, Kami menemukan fakta bahwa disparitas distribusi dan kelangkaan pupuk bersubsidi telah menjadi variabel eksogen yang mengancam stabilitas produksi kaum tani.

Maka dari itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan, yang pertama ialah Auditing Data. Hentikan praktik retorik, Segera lakukan audit ulang dan reformasi sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena Kegagalan integrasi data juga sama halnya dengan kegagalan Negara dalam melindungi produsen

pangan kita. Selanjutnya yang kedua ialah Modernisasi Pertanian. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan untuk intervensi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta riset benih unggul, guna menjawab aspirasi dari kelompok tani di daerah Grobogan, Banyumas, dan Blora, sekaligus memitigasi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.

Yang tak kalah penting, Pembangunan infrastruktur dasar tentu sebagai prasyarat bagi mobilitas ekonomi rakyat. Permintaan berulang terkait Pembangunan Jalan Rabat Beton, Talud, dan Perbaikan Drainase mengindikasikan adanya defisit equity (keadilan) dalam alokasi anggaran atau realisasinya. Oleh karenanya, Kami menegaskan Prinsip Masif Berkeadilan. Yang mana pemerintah harus mengalokasikan anggaran infrastruktur secara masif dan berkeadilan ke daerah basis pertanian dan pesisir. APBD haruslah menghentikan fokus kosmetika perkotaan dan beralih pada penguatan fondasi ekonomi desa untuk menyolidkan gerakan membangun desa. Selanjutnya mengenai Akuntabilitas Dana Desa, kita harus mendukung penuh desakan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh Pemerintah Desa untuk menjamin tingginya partisipasi publik dan mencegah penyelewengan.

Kemudian mengenai aspek Perlindungan Sosial dan Kesehatan Publik. Mengingat kondisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sempurna dan tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) merefleksikan lemahnya jejaring pengaman sosial. Selain itu, terdapat kemunculan peningkatan kasus Leptospirosis dan Stunting di sebagian wilayah jelas tantangan isu kesehatan publik yang mendesak dan harus segera ada tindak lanjut.

Maka demikian, Fraksi PDI Perjuangan menuntut adanya Reformasi Mekanisme Bansos dengan melakukan percepatan penyaluran Bansos (minimal pertengahan tahun) dan perlu meningkatkan indeks besaran Hibah serta Bansos untuk mendukung lembaga sosial di garda terdepan. Pemerintah juga harus melakukan Pemberdayaan Kader, segera berikan insentif dan honorarium yang layak bagi Kader Kesehatan Desa dan Kader Posyandu tentu dengan kajian mendalam. Mereka adalah investasi strategis dalam pencegahan Stunting dan penanganan Leptospirosis.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Fraksi PDI Perjuangan akan terus menjadi pionir dalam mengawal dan memastikan tindak lanjut nyata atas seluruh temuan reses ini. Kami berharap Pemerintah Provinsi menjadikan Pandangan Umum ini sebagai instrumentasi politik kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Sebelum mengakhiri laporan dan pandangan umum ini, kami kutipkan kata mutiara sebagai pantikan semangat dari Bung Karno : “Aku ini bukan apaapa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat”.

Demikianlah laporan hasil reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025 / 2026 Fraksi PDI Perjuangan kali ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua, Merdeka !!!

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua

ttd

Abang Baginda Muhammad Mahfuz H

Sekretaris

ttd

Juli Krisdianto, SE